BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas

Setelah sebelumnya menjabarkan hal - hal yang melatarbelakangi penelitian ini, teori – teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka pada bab IV ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer

4.1.1 Sejarah Singkat Dinas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh penrangkat daerah yang dapat menyelanggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 17 sampel dinas yang berada di Kabupaten Cianjur. Pada tabel 4.1 akan merangkum secara keseluruhan tentang profil singkat dari dinas.

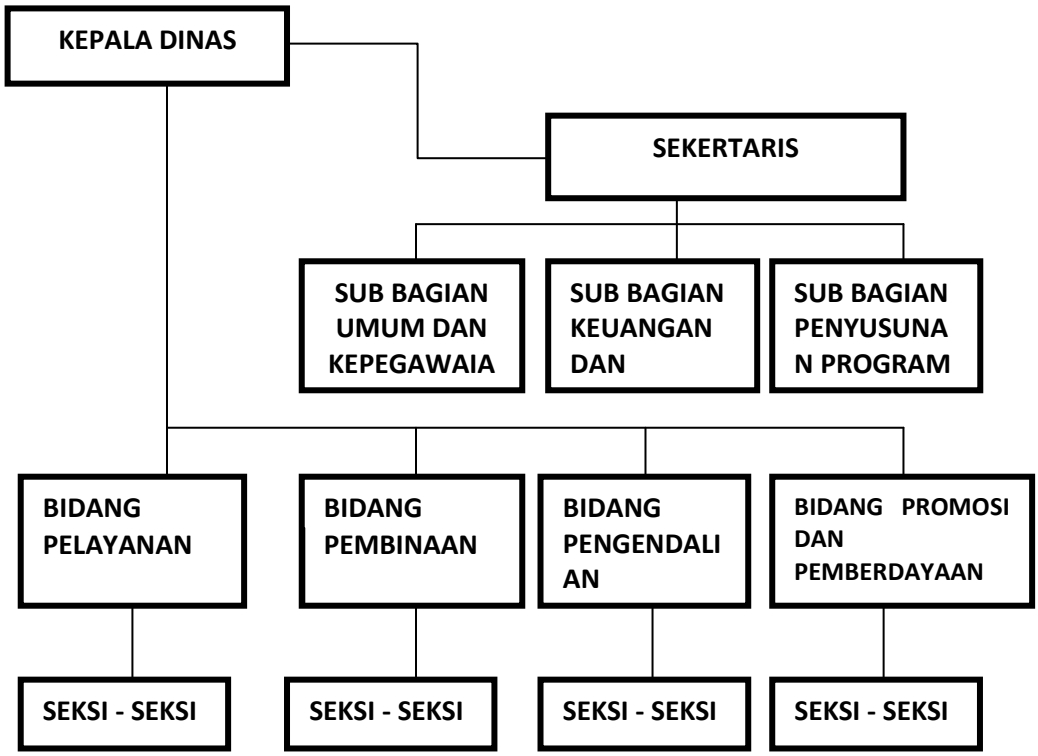
Tabel 4.1
Profil Dinas Kabupaten Cianjur

No	Nama Dinas	Alamat Dinas	Kepala Dinas
1	Dinas Peternakan, Perikanan dan kelautan	Jl. Slamet Riyadi No.8 Cianjur, Telp. (0263) 261293	Ir. Mahani 195611301987032001
2	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Jl.Perintis Kemerdekaan No. 5 Telp.(0263) 265110	Hj. Rika Ida Mustikawati, Sh., Mm. 195810211986032003
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jl. Dr Muwardi No.395 Telp.(0263) 269718	H. Asep Sopyan, Sh 196211211991031002
4	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Jl.Pangeran Hidayatullah (Sawahgede)	Drs. Moch. Ginanjar, Map 195905111989031003
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Jl. Raya Bandung KM. 4,5 Tlp.(0263) 261221-262464	Hilman Kurnia Rahdiana, S.Pd, M.Si 196810041991031006
6	Dinas Kesehatan	Jl. Prof Moch. Yamin No 8	Dr. H. Gusti Otwin Ariono 195804301987111001
7	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jl. Aria Wiratanudatar Telp.(0263) 264874	Drs. H. Dudun Abdulah, Sq, Mm 196404021990031007
8	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Jl. Adi Sucipta No.2 Telp.(0263) 263198 - 270264	Drs. H. Atte Adha Kusdinan, Mm 195806211983021002
9	Dinas Pendidikan	Jl. Perintis Kemerdekaan No.3 Telp.(0263) 264760	Drs. Endang Suhendar, M.Pd 196009241988101001
10	Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah		Budhi Rahayu Toyib, S.Sos, Mm 196211111989031030
11	Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air dan Pertambangan	Jl. Adi Sucipta No.7 Telp/Fax (0263) 261210	H.Oting Zaenal Mutaqin,Sh,Mm 196103131991021001
12	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Jl. Dr Muwardi No.395 Tlp.(0263) 263424	H. Aban Subandi, Sh, Mm 196007031983111001
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jl. Aria Wiratanudatar No.178 Telp.(0263) 261164	Drs. H. Himam Haris, M.Mpd 196309011990031009
14	Dinas Perpajakan Daerah	Jl.Raya Bandung	Dadan Harmilan, Sh, Mh 196110051990111001
15	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	Jl. Raya Bandung No.61 Tlp.(0263) 261156	Drs. H. Sudradjat Laksana 195901131985031007
16	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jl. Raya Bandung KM. 4,5	Drs. H. Sumitra, Mm 195802061977031001
17	Dinas Tata Ruang dan Pemukiman	Jl. Prof. Moch Yamin 131 Telp.(0263) 261618 Fax (0263) 264010	Drs. H. Edi Iryana 196607311997031004

Sumber : Website Kabupaten Cianjur, 2012

4.1.2 Struktur Organsasi

Dimana susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terlihat dari gambar 4.1 dibawah ini :



Sumber : Website kabupaten Cianjur, 2012

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Kabupaten Cianjur

a. Kepala dinas;

b. Sekretariat, membawahkan :

   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

   2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

   3) Sub Bagian Penyusunan Program.

c. Bidang Pelayanan, membawahkan :

   1) Seksi Manajemen

   2) Seksi Pengendalian.

d. Bidang Pembinaan, membawahkan seksi – seksi pembinaan:

e. Bidang Pengendalian, membawahkan seksi – seksi pengendalian;
f. Bidang Promosi dan Pemberdayaan, membawahkan seksi – seksi Promosi dan Pemberdayaan
g. UPTD
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.1.3 *Job Description*

Berikut tanggungjawab dan tugas – tugas pokok masing – masing jabatan berdasarkan struktur organisasi pada Dinas Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

1. Sekertaris mempunyai tugas pokok menyiapkan penyusunan kesekretariatan; pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian; pengkoordinasian penyelenggaraan tugas – tugas bidang.

   Dalam melaksanakan fungsi tersebut, sekretaris dibantu oleh :

   a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

      Untuk melaksanakan tugas pokok maka Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi : menyusun rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian,; Pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan rencana, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan anggaran; Pengkoordinasian, pengendalian dan penyusunan Laporan Keuangan; Pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, pembinaan, disiplin pengembangan, diklat pegawai dan kesejahteraan pegawai.

b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi : Penyusunan program dan kegiatan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan; Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan meliputi pengelolaan tata usaha, naskah dinas, kearsipan dinas, rumah tangga dinas dan perlengkapan.

c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Untuk melaksanakan tugas pokok maka Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi : Penyusunan rencana kerja bidang perencanaan dan pengendalian operasional; pelaksanaan koordinasi penyusunan program Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika; Pelaksanaan koordinasi rencana komunkasi dan informatika daerah; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah

2. Bidang Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang pelayanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja;
b. pengkajian bahan kebijakan teknis;
c. pengkajian bahan pembinaan dan pengembangan di bidang manajemen dan rekayasa; pengendalian dan operasi;
d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Dalammelaksanakan tugas pokoknya, Seksi Manajemen dan Rekayasa mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa;

b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas
c. penyusunan bahan kajian kebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
d. penyusunan bahan penetapan dan pengembangan jaringan dan kelas jalan; penentuan lokasi parkir dan penyelenggaraan pembangunan tempat parkir;
e. penyusunan bahan pertimbangan dan rekomendasi teknis analisis dampak lalu lintas; penentuan lokasi parkir untuk umum; penyelenggaraan dan pembangunan parkir dan penggunaan jalan di luar fungsi;

3. Bidang Pengendalian

   Bidang Angkutan mempunyai tugas menyiapkan menyiapkan perencanaan trayek, menyiapkan rencana Bidang Prasarana dan Prasarana Perhubungan

4. Bidang Promosi dan Pemberdayaan

   Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, bidang promosi dan pemberdayaan mempunyai tugas untuk melakukan penyuluhan – penyuluhna dan mempromosikan program yang akan dilakukan.

4.1.4 Aktivitas Dinas

Pada Dinas SKPD, banyak sekali aktivitas yang harus sesuai dengan *jobdesk* nya masing – masing. Berikut salah satu contoh aktivitas Dinas yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika .

1. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
   a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

b. Pengadaan Fasilitas Perhubungan Pendukung Penataan Kota Cianjur

c. Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

d. Pengadaan Kerucut Lalu Lintas

2. Penyediaan Informasi Publik melalui media Internet

a. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

b. Pembinaan dan Pengelolaan Manajemen LPSE

3. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj

a. Rehabilitasi /Pemeliharaan alat Pemberi Isyarat

b. Penataan Emplasemen Parkir

c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

4. Program peningkatan pelayanan angkutan

a. Pengendalian/Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2013

b. Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Trayek Angkutan

c. Pembinaan Operator Angkutan

5. Program kerjasama informasi dengan mas media

a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui pemutaran film

b. Sosialisasi Program Pemerintah melalui Pertunjukan Rakyat

c. Peningkatan Kualitas Informasi melalui Liputan Siaran Radio

5. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

a. Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas

b. Forum Lalu Lintas

c. Pengelolaan Pemungutan Retribusi Parkir

d. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepada Petugas Parkir

e. Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Perhubungan

f. Pengadaan Fasilitas Penyelenggaraan Parkir

g. Program pengendalian jasa usaha pos dan telekomunikasi

h. Pembinaan Jasa Pos dan Telekomunikasi

6. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor

b. Pengelolaan Sarana Pengujian Keliling dan Rescue /derek

7. Program pengembangan data dan informasi lalu lintas

a. Pemutakhiran Data Base Perhubungan

b. Pemetaan Parkir di Kabupaten Cianjur

c. Survey Pengendalian Lalu Lintas

4.2 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh penulis adalah sebanyak 34 responden dari karyawan – karyawati Dinas Kabupaten Cianjur dari bagian Auditor dan Kepala Dinas. Data mengenai karakteristik responden adalah sebagai berikut :

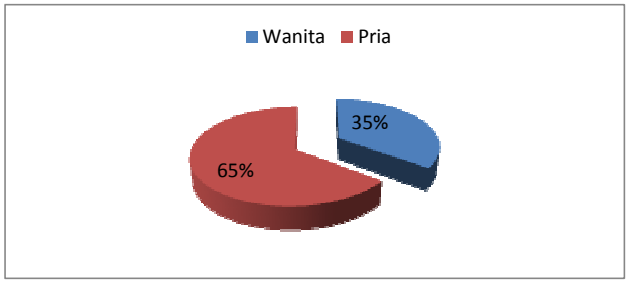
a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada Dinas Kabupaten Cianjur

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
1	Wanita	12	35%
2	Pria	22	65%
	Jumlah	**34**	**100%**

Sumber: Data yang telah diolah,2012



Gambar 4.2
Grafik Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin wanita sebanyak 35%, dan responden dengan jenis kelamin pria sebanyak 65%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini penelitian ini berjenis kelamin pria. Hal ini disebabkan, kuesioner yang dibagikan kepada Dinas Kabupaten Cianjur lebih banyak responden pria karena pria lebih tegas dan lebih siap untuk berargumentasi dan pada kenyataannya pegawai pria lebih banyak daripada pegawai wanita pada Dinas di wilayah Kabupaten Cianjur

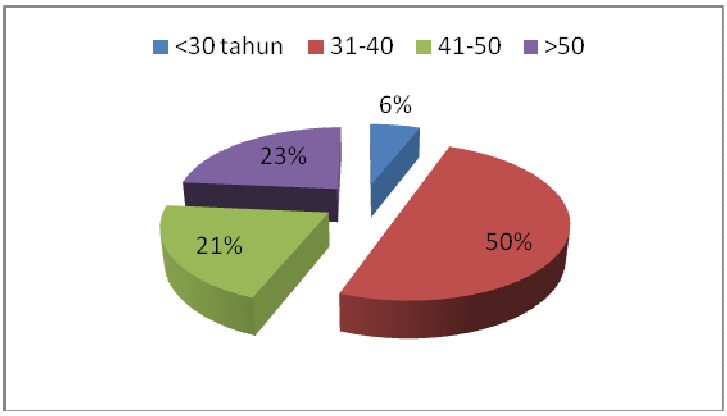
b. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Usia
Pada Dinas Kabupaten Cianjur

Usia	Jumlah Responden	Persentase %
<30 Tahun	2	6%
31-40Tahun	17	50%
41-50Tahun	7	21%
>50Tahun	8	23%
Jumlah	**34**	**100 %**

Sumber: Data yang telah diolah,2012



Gambar 4.3
Grafik Profil Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia antara kurang dari 30 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 6%, 31 - 40 tahun berjumlah 17 orang atau sebesar 50%, 41-50 tahun berjumlah 7 orang atau sebesar 21%, dan yang lebih dari 40 tahun berjumlah 8orang atau sebesar 23%, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-40 tahun. Hal ini terjadi karena usia 31-40 tahun masih tergolong usia yang produktif untuk bekerja dan masih memiliki kemampuan yang baik selain itu, pada usia tersebut, pengalaman mereka dalam bekerja pasti sudah sangat baik.

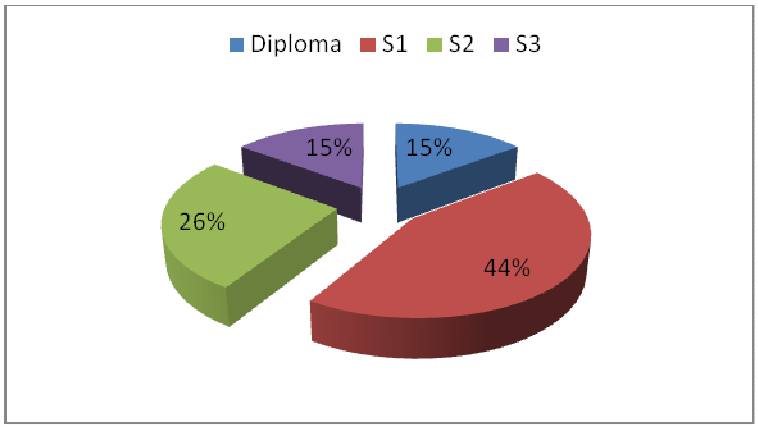
c. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 4. 4 berikut

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Pada Dinas Kabupaten Cianjur

Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase %
Diploma 3	5	15%
S1	15	44%
S2	9	26%
S3	5	15%
Jumlah	**34**	**100%**

Sumber: Data yang telah diolah,2012



Gambar 4.4
Grafik Profil Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir Diploma III (D3) sebanyak 5 orang atau sebesar 15%, responden dengan pendidikan terakhir Strata I (S1) sebanyak 15 orang atau sebesar 44% dan pendidikan terakhir Strata II (S2) sebanyak 9 orang atau sebesar 26%, sedangkan sisanya sebanyak 5 orang atau sebesar 15% responden dengan pendidikan akhir S3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata I (S1). Hal ini berarti Kepala Dinas beserta staf nya pada dinas di Kabupaten Cianjur merupakan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan tinggi seiring dengan tuntutan profesionalitas dalam melakukan pekerjaannya. Disamping itu tidak sedikit pula terdapat responden dalam penelitian ini sedang dalam menyelesaikan tingkat pendidikan S2.

d. Analisis Hasil Tanggapan Responden

Gambaran data hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap setiap indikator dan variabel yang

sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden melalui persentase jumlah skor tanggapan responden.

Prinsip kategorisasi jumlah skor tanggapan responden di adopsi dari buku Metode Penelitian Bisnis karangan Sugiyono (2009;135) yaitu berdasarkan persentase skor jawaban responden dengan rumus sebagai berikut.

$$\%\,\text{Skor} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}}$$

Keterangan:

Skor aktual = jumlah skor jawaban responden
Skor ideal = jumlah skor maksimum
(jumlah responden × jumlah pernyataan × 5)

Selanjutnya persentase skor jawaban responden yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan rentang persentase skor maksimum (5/5 =100%) dan skor minimum (1/5 = 20%). Analisis deskriptif dilakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada setiap variabel yang diteliti dengan berpedoman pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Kriteria Pengklasifikasian Presentase Skor Tanggapan Responden

No.	% Skor	Kriteria
1	20.00% – 36.00%	Tidak Baik
2	36.01% – 52.00%	Kurang Baik
3	52.01% – 68.00%	Cukup
4	68.01% – 84.00%	Baik
5	84.01% – 100%	Sangat Baik

Sumber: Umi Narimawati , 2010

4.3 Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini untuk setiap variabel akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan kuesioner, bahwa variabel audit internal, pengawasan intern dan *good government governance.*

Pada variabel audit internal terdiri atas 4 (empat) dimensi yaitu perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian, penyampaian hasil pemeriksa, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kemudian variabel pengawasan intern terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu *control environment, risk assessment, control activities, information dan communication, serta monitoring*. Sedangkan variabel *good government governance* terdiri dari 10 (sepuluh) dimensi yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, bervisi strategi dan saling keterkaitan. Selanjutnya analisis data kualitatif yang menggunakan metode analisis deskriptif dengan cara membuat tabel distribusi frekuensi dari tiap-tiap tanggapan responden.

4.2.1 Deskriptif Variabel Audit Internal

Dalam menganalisis variabel audit internal, penulis akan melakukan analisis terhadap data dan informasi yang penulis peroleh dari lokasi penelitian. Dalam Variabel audit internal terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian, penyampaian hasil pemeriksa, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan jumlah item pertanyaan 20 (dua puluh) item pertanyaan dari 34 responden atas kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden mengenai dimensi audit internal dapat terlihat dalam tabel di berikut ini.

Tabel 4.6
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Audit Internal

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kriteria
1	Penetapan tujuan dan lingkup pekerjaan	228	340	67%	Cukup
2	Memperoleh Informasi Dasar	241	340	71%	Baik
	Perencanaan Pemeriksaan	437	680	64%	Cukup
3	Pengumpulan informasi	228	340	67%	Cukup
4	Informasi yang kompeten, relevan dan berguna	250	340	74%	Baik
5	Prosedur pemeriksa	237	340	70%	Baik
6	Pengawasan pada proses pengumpulan analisis	239	340	70%	Baik
	Pengujian dan pengevaluasian	954	1360	70%	Cukup
7	Laporan tertulis	216	340	64%	Cukup
8	Diskusi Kesimpulan dan rekomendasi	224	340	66%	Cukup
9	Objektif	232	340	68%	Baik
	Penyampaian hasil periksa	672	1020	66%	Cukup
10	Sifat Ketepatan waktu	213	340	63%	Cukup
	Tindak lanjut hasil pemeriksaan	213	340	63%	Cukup
	TOTAL	**2276**	**3400**	**67%**	Cukup

Sumber : Data yang diolah tahun 2012

Pada tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan persentase total skor tanggapan responden pada variabel Audit internal sebesar 67% berada di antara interval 52,01%-68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa audit internal pada Dinas Kabupaten Cianjur secara umum dikategorikan cukup. Selanjutnya bila dilihat berdasarkan indikator tampak bahwa persentase skor tanggapan responden pada sebagian besar dimensi juga berada pada interval 52,01%-68,00% yang termasuk dalam kategori Cukup. Namun jika dilihat dari segi informasi yang kompeten, relevan dan berguna maka dapat dikategorikan sudah baik. Skor terendah yang terdapat pada variabel audit internal, yaitu terdapat pada indikator sifat ketepatan waktu (dimensi tindak lanjut hasil pemeriksaan), dimana persentase skor yang didapatkan adalah sebesar 63 % berada di kategori cukup. Hal ini dapat terjadi akibat dari tujuan pemeriksaan

yang masih belum sesuai dengan lingkup pekerjaan dan belum sepenuhnya sesuai prosedur pemeriksaan.

4.3.2 Deskriptif variabel pengawasan intern

Dalam menganalisis variabel pengawasan intern, penulis akan melakukan analisis terhadap data dan informasi yang penulis peroleh dari lokasi penelitian. Dalam variabel pengawasan intern terdiri atas 5 (lima) dimensi yaitu *control environment, risk assessment, control activities, information* dan *communication, serta monitoring* dengan jumlah item pertanyaan sebanyak 15 (lima belas) item pertanyaan dari 34 responden atas kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden mengenai dimensi pengawasan intern dapat terlihat dalam tabel di 4.7 berikut.

Tabel 4.7
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pengawasan Intern

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kriteria
1	Integritas, etika, kompetensi	250	340	74%	Baik
2	Philoshophi Manajemen	252	340	74%	Baik
	Cintrol Environment	502	680	74%	Baik
3	Tujuan Organisasi	419	510	82%	Baik
	Risk Assessment	419	510	82%	Baik
4	Kebijakan	260	340	76%	Baik
	Control Activities	260	340	76%	Baik
5	Informasi yang relevan perlu diidentifikasi	366	510	72%	Baik
	Information and Comunication	366	510	72%	Baik
6	Aktivitas pemantauan yang berkesinambungan	375	510	74%	Baik
	Monitoting	375	510	74%	Baik
	TOTAL	**1922**	**2550**	**75%**	**Baik**

Sumber : Data yang diolah tahun, 2012

Pada tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan persentase total skor tanggapan responden pada variabel pengawasan intern sebesar 75% berada di antara interval 68,01% - 83%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

pengawasan intern pada Dinas Kabupaten Cianjur secara umum dikategorikan baik. Selanjutnya bila dilihat berdasarkan dimensi tampak bahwa persentase skor tanggapan responden pada sebagian besar dimensi juga berada pada interval 68,01% - 83% yang termasuk dalam kategori baik. Namun jika dilihat dari *information and comunication* skor yang diperoleh adalah 72 dimana ini menjadi skor terendah yang terdapat pada variabel pengawasan intern Ini dapat terjadi akibat dari masih terdapat kasus kesalahan informasi atau komunikasi yang wajib dipertanggungjawabkan oleh dinas.

4.3.3 Deskriptif Variabel *Good Government Governance*

Dalam menganalisis variabel *good government governance*, penulis akan melakukan analisis terhadap data dan informasi yang penulis peroleh dari lokasi penulisan. Dalam variabel pengawasan intern terdiri dari 10 (sepuluh) dimensi yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, bervisi strategi dan saling keterkaitan dengan jumlah item pertanyaan 20 (dua puluh) item pertanyaan dari 34 responden atas kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden mengenai dimensi *good government governance* dapat terlihat dalam tabel 4.8 berikut .

Tabel 4.8
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden *Good Government Governance*

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kriteria
1	Pengambilan keputusan	245	340	72%	Baik
2	Berkeadilan dan dipatuhi secara utuh	294	340	86%	Sangat Baik
3	Bebas, Transparan	241	340	71%	Baik
4	Pelayanan terhadap stakeholders	180	340	53%	Cukup
5	Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan pemerintah	223	340	66%	Cukup
6	Memberikan Kesempatan dan memelihara kualitas hidup	221	340	65%	Cukup
7	Memberikan sesuatu yang sesuai dengan pemanfaatannya	253	340	74%	Baik
8	Pertanggungjawaban terhadap publik (akuntabilitas)	428	510	84%	Baik
9	Saling memperkuat	116	170	68%	Cukup
10	Saling terkait	227	340	67%	Cukup
	TOTAL	**2428**	**3400**	**71%**	**Baik**

Sumber : Data yang diolah tahun, 2012

Pada tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan persentase total skor tanggapan responden pada variabel *good governmnet governance* sebesar 71% berada di antara interval 68,01% - 83%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *good governmnet governance* pada Dinas Kabupaten Cianjur secara umum dikategorikan baik. Selanjutnya bila dilihat berdasarkan dimensi tampak bahwa persentase skor tanggapan responden pada sebagian besar dimensi juga berada pada interval 68,01% - 83% yang termasuk dalam kategori baik. Namun jika dilihat dari indikator pelayanan terhadap publik, kebijakan dan prosedur serta saling memperkuat skor yang diperoleh rata – rata adalah cukup dimana ini menjadi skor terendah yang terdapat pada variabel *good government governance.* Ini dapat terjadi akibat dari masih lemahnya penerapan *good governmnet governance*dalam hal pelayanan terhadap publik, kebijakan dan prosedur serta saling memperkuat.

Untuk lebih jelasnya pada grafik berikut ini dapat dilihat gambaran pelaksanaan pengawasan intern pada masing – masing dinas di wilayah Kabupaten Cianjur.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk melakukan prediksi, perubahan nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen naik atau turun nilainya. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan karena variabel yang menjadi kajian dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu dua variabel independen yaitu penerapan audit internal sebagai variabel X1 dan pengawasan intern sebagai variabel X2 dan satu variabel dependen yaitu *good government governance* variabel Y.

Sehingga dapat diketahui dan dibuktikan sejauh mana pengaruh audit intern dan pengawasan intern terhadap *good government governance*. Cara perhitungan komputerisasi dengan menggunakan media program komputer yaitu *PASW 18 for windows* dan diperoleh hasil output sebagai berikut :

Tabel 4.9

Hasil Uji-t Variabel audit internal dan pengawasan intern terhadap *good government governance*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.599	9.624		2.868	.007
	Audit internal	.332	.104	.448	3.189	.003
	Pengawasan intern	.396	.147	.378	2.690	.011

Sumber : Data yang diolah tahun 2012

Dari tabel diatas dibentuk persamaan regresi linier sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = 27 + 0{,}332\ X_1 + 0{,}396\ X_2}$$

Dimana :

Y = *Good Government Governance*

X_1 = Audit Internal

X_2 = Pengawasan Intern

Berdasarkan persamaan prediksi diatas, maka dapat diinterpretasikan koefisien regressi dari masing-masing variabel independen sebagai berikut:

- Koefisien audit internal sebesar 0,332 menunjukkan bahwa setiap audit internal sebesar satu satuan diprediksi akan meningkatkan *good government governance* sebesar 0,332 satuan dengan asumsi pengawasan intern tidak berubah.
- Koefisien pengawasan intern sebesar 0,396 menunjukkan bahwa setiap pengawasan intern sebesar satu satuan diprediksi akan meningkatkan *good government governance* 0,396 satuan dengan audit internal tidak berubah.
- Nilai konstanta sebesar 27 menunjukan nilai prediksi rata-rata *good government governance* apabila penerapan audit internal dan pengawasan intern sama dengan nol.

Analisis Korelasi Parsial

Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan masing-masing variabel independen (audit internal dan pengawasan intern) dengan *good government governance*. Melalui korelasi parsial akan dicari pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap *good government governance* ketika variabel independen lainnya konstan.

Tabel 4.10
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

No	Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
1	0,000 – 0,199	Sangat Lemah
2	0,200 – 0,399	Lemah
3	0,400 – 0,599	Cukup Kuat
4	0,600 – 0,799	Kuat
5	0,800 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono, 2009; 250

Tabel 4.11
Korelasi Hubungan Antar Variabel

Correlations

		Y	X1	X2
Pearson Correlation	Y	1.000	.544	.492
	X1	.544	1.000	.256
	X2	.492	.256	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000	.002
	X1	.000	.	.072
	X2	.002	.072	.
N	Y	34	34	34
	X1	34	34	34
	X2	34	34	34

Berdasarkan nilai koefisien korelasi diatas dapat dilihat bahwa hubungan antara audit internal (X1) dengan *good government governance* (Y) sebesar 0,544 dan masuk dalam kategori cukup kuat. Arah hubungan positif antara audit internal dengan *good government governance* menunjukan bahwa audit internal yang baik akan diikuti dengan peningkatan *good government governance.* Dan kemudian hubungan antara pengawasan Intern (X2) dengan *good government governance* sebesar 0,492 termasuk kedalam kategori cukup kuat dengan arah positif.

4.4.1 Pengaruh Audit Internal (X_1) Dengan *Good Government Governance* (Y) Secara Parsial

Koefisien korelasi antara audit internal dengan *good government governance* ketika audit internal tidak berubah dapat dilihat dari Hasil perhitungan dengan perhitungan *PASW 18 for windows* terlihat pada tabel 4.28 berikut.

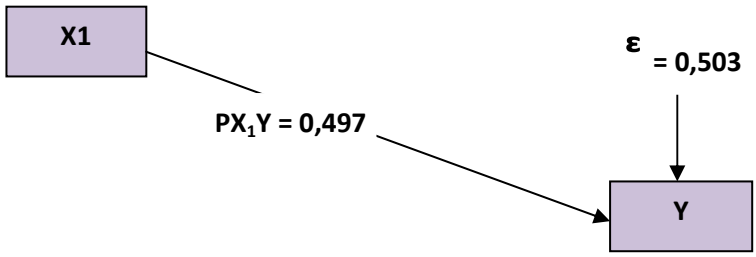
Tabel 4.12
Koefisien Korelasi Parsial Audit Internal dengan *Good Government Governance*

Correlations

Control Variables			Auditinternal	GGG
Pengawasanintern	Auditinternal	Correlation	1,000	,497
		Significance (2-tailed)		,003
			0	31
	GGG	Correlation	,497	1,000
		Significance (2-tailed)	,003	
			31	0

Sumber : Data yang diolah tahun 2012

Hubungan antara audit internal dengan *good government governance* adalah sebesar 0,497 dengan arah positif. Artinya hubungan antara audit internal dengan *good government governance* termasuk cukup kuat. Ini menggambarkan bahwa ketika penerapan audit internal semakin baik maka akan meningkatkan *good government governance*. Kemudian besar pengaruh penerapan audit internal dengan *good government governance* pada Dinas Kabupaten Cianjur ketika audit internal tidak berubah adalah $(0,497)^2 \times 100\% = 24,70\%$.



Gambar 4.5
Diagram Dan Koefisien Korelasi Pengaruh Audit Internal Terhadap *Good Government Governance*

4.4.2 Pengaruh Pengawasan Intern ($X_{2)}$ Dengan *Good Government Governance* (Y) Secara Parsial

Koefisien korelasi antara pengawasan intern dengan *good government governance* dapat dilihat dari hasil perhitungan dengan perhitungan *PASW 18 for windows* terlihat pada tabel 4.15 berikut.

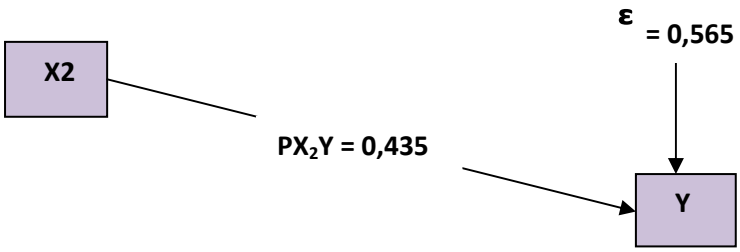
Tabel 4.13
Koefisien Korelasi Parsial Pengawasan Intern dengan *Good Government Governance*

Correlations

Control Variables			Pengawasanintern	GGG
Auditinternal	Pengawasanintern	Correlation	1,000	,435
		Significance (2-tailed)		,011
			0	31
	GGG	Correlation	,435	1,000
		Significance (2-tailed)	,011	
			31	0

Sumber : Data yang diolah ,tahun 2012

Hubungan antara pengawasan intern dengan *good government governance* adalah sebesar 0,435 dengan arah positif. Artinya hubungan antara pengawasan intern dengan *god government governance* termasuk lemah. Ini menggambarkan bahwa ketika penerapan pengawasan internal semakin baik maka akan meningkatkan *good government governance*. Kemudian besar pengaruh penerapan pengawasan internal dengan *good government governance* pada Dinas Kabupaten Cianjur ketika pengawasan intern tidak berubah adalah $(0,435)^2 \times 100\% = 18,92\%$.



Gambar 4.6
Diagram Dan Koefisien Korelasi Pengaruh Pengawasan Intern Terhadap *Good Government Governance*

4.4.3 Pengaruh Audit Internal dan Pengawasan Intern Terhadap *Good Government Governance* Secara Simultan

Koefisien korelasi antara Audit internal dan pengawasan intern terhadap *good governmnet governance* dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut.

Tabel 4.14
Koefisien Determinansi Audit Internal dan Pengawasan Intern terhadap *Good Government Governance*

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.655[a]	.429	.392	5.18392

a. Predictors : (Constant),pengawasanintern,auditinternal
b. Dependent Variabel : goodgovernemntgovernance

Sumber : Data yang diolah, tahun 2012

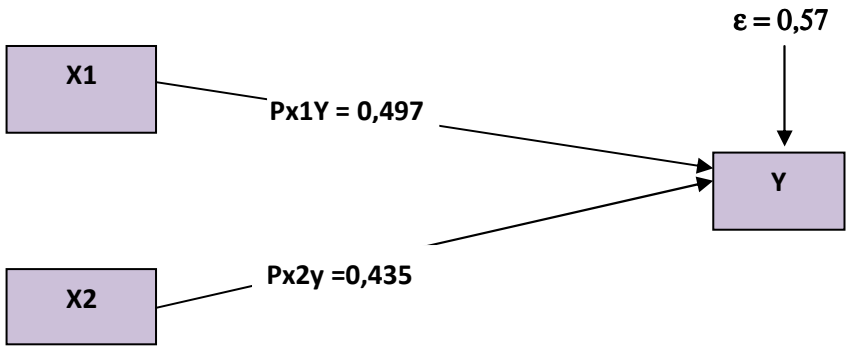
Nilai R (0,655) pada tabel 4.16 menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel independen (audit internal dan pengawasan intern) secara simultan dengan *good government governance*. Jadi diketahui bahwa secara simultan kedua variabel independen (audit internal dan pengawasan intern) memiliki hubungan yang kuat dengan kepatuhan Wajib pada Dinas Kabupaten Cianjur.

Nilai korelasi *r* hanya menyatakan erat atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen (variabel X) terhadap variabel dependen

(variabel Y), digunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun rumus dari koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Kd = r2 x 100 %
Kd = $(0,655)^2$ x 100 %
Kd = 0,429025 x 100%
Kd= 42,90%
Kd = 43% (Pembulatan)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan koefisien yang dipergunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Hasil R^2 = 0,429 berarti variabel *good government governance* dapat dijelaskan oleh variabel audit internal dan pengawasan intern sebesar 42,9%, sedangkan sisanya 57,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.



Gambar 4.7
Diagram Dan Koefisien Korelasi Pengaruh Audit Internal dan Pengawasan Intern Terhadap *Good Government Governance*

4.4.4 Pembahasan

Pada sub bab ini peneliti akan menjabarkan hasil dari penelitian tentang pengaruh audit internal dan pengawasan intern pada Dinas SKPD Kabupaten Cianjur. Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data hasil penelitian adalah analisis deskriptif dan pengujian hipotesis. Pada analisis deskriptif digunakan persentase jumlah skor jawaban untuk merepresentasikan tanggapan responden atas pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Pada pengujian hipotesis peneliti menggunakan metode analisis regresi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, regresi yang digunakan adalah regresi linier berganda. Karena hasil skoring jawaban responden pada semua variabel masih merupakan data ordinal maka agar data dapat diolah menggunakan analisis regresi terlebih dahulu dikonversi menjadi skala interval menggunkan *method of succesive interval*. Dan kemudian seluruh data yang diperoleh dari penelitian dapat di olah sesuai untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan.

4.4.4.1 Analisis Deskriptif Audit Internal

Dari hasil pengujian yang sudah dilakukan sebelumnya, dapat diketahui bahwa audit internal pada Dinas Kabupaten Cianjur yang dikemukakan oleh responden termasuk dalam kategori yang cukup. Dimana, secara umum audit internal yang dilakukan terhadap dinas – dinas yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai perbandingan, dimensi pengujian dan pengevaluasian memiliki persentasi yang lebih baik daripada dimensi penyampaian hasil pemeriksaan. Hal ini disebabkan oleh laporan tertulis dan laporan hasil rekomendasi yang belum akurat dan belum ditindaklanjuti. Karena menurut IHP semester I tahun 2011 Kabupaten Cianjur

memiliki jumlah rekomendasi yang belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 128 atau 37% dan sebanyak 165 rekomendasi atau 28% belum ditindaklanjuti. Tentu saja ini merupakan salah satu unsur yang memberikan hasil bahwa audit internal tidak berjalan dengan baik. Begitu juga dengan perencanaan pemeriksaan pemeriksaan yang masih tergolong cukup. Banyak faktor yang melatarbelakangi yaitu salah satunya belum siap dan maksimalnya perencanaan pemeriksaan yang akan dilakukan.

Diharapkan dengan membaiknya audit internal yang dilakukan oleh auditor internal dalam memeriksa setiap unit dan area sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dapat meningkatkan sistem pemerintahan yang lebih baik pada dinas SKPD wilayah Kabupaten Cianjur. Terutama dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi dari BPK. Sehingga kelemahan – kelemahan yang terdapat pada seluruh dinas dapat diketahui.

4.4.1.2 Analisis Deskriptif Pengawasan Intern

Dari hasil pengujian analisis deskriptif sebelumnya, dapat terlihat bahwa secara keseluruhan pengawasan intern yang terdapat pada Dinas di Kabupaten Cianjur berada pada kategori baik. Artinya secara menyeluruh kegiatan dan hal – hal yang dilakukan berhubungan dengan pengawasan intern sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dilihat dari skor persentase yang paling terendah terdapat pada dimensi Informasi dan komunikasi. Karena pada dimensi ini masih terdapat sejumlah kasus seperti kelemahan dalam sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 3 kasus. Sebab - sebab persoalannya bisa terjadi akibat pencatatan yang belum/tidak akurat, entitas terlambat menyampaikan laporan serta sistem informasi akuntansi dan pelaporan

yang tidak memadai. Selain itu pada dimensi *control environment* walaupun secara keseluruhan sudah berada dalam kriteria yang baik, namun masih ada sedikit permasalahan yang ditimbulkan yaitu pada kelemahan struktur pengendalian intern yang bisa terjadi karena entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, entitas tidak memiliki SPI, atau SPI yang sudah ada tidak memadai dan berjalan dengan optimal.

Namun masih terdapat skor yang memiliki persentase paling tinggi yaitu ada pada dimensi *risk assessment* dan masih tergolong dikatakan baik. Hal ini terjadi karena pada pemeriksaan internal yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan organisasi yang teah ditetapkan dan setiap resiko yang ada sudah mampu dikelola dengan baik. Jika dengan kategori sepeti ini maka pengawasan intern yang dilakukan pada dinas di Kabupaten Cianjur telah mampu menciptakan *good government governance*.

4.4.4.3 Analisis Deskriptif *Good Government Governance*

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya dapat diketahui bahwa *good government governance* pada Dinas Kabupaten Cianjur termasuk dalam kategori yang baik. Artinya secara menyeluruh kegiatan dan hal – hal yang berhubungan dengan *good government governance* sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi jika dijabarkan secara indikator, masih terdapat beberapa hal yang berada dalam kategori cukup diantaranya indikator mengenai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan pemerintah, pelayanan terhadap stakeholders, dan saling memperkuat. Faktor utama yang melatarbelakangi hal – hal tersebut adalah kelemahan pada unsur sumberdaya manusia itu sendiri,dimana satuan pengawas internal yang telah ada masih perlu dibenahi.

Namun, masih terdapat indikator yang menunjukan kriteria skor tinggi yaitu berkeadilan dan dipatuhi secara utuh. Serta pertanggungjawaban terhadap publik. Jika hal ini diikuti pula dengan indikator lainnya, maka *good government governance* pada Dinas SKPD di wilayah Kabupaten Cianjur dapat terlaksana dengan baik dan benar.

4.4.4.3 Pengaruh Audit Internal dan Pengawasan Intern Terhadap *Good Government Governance* Secara Simultan dan Parsial

1) Pengaruh Audit Internal terhadap *Good Government Governance* secara parsial

Hubungan antara audit internal dengan *Good Government Governance* berada pada arah positif. Artinya hubungan antara audit internal dengan *Good Government Governance* termasuk Cukup Kuat. Ini menggambarkan bahwa ketika audit internal semakin baik, maka akan meningkatkan *Good Government Governance* pada Dinas di wilayah Kabupaten Cianjur.

Melalui data yang terkumpul dilapangan, terbukti bahwa ada pengaruh yang signifikan dari audit internal terhadap *Good Government Governance* pada *Good Government Governance* pada Dinas di wilayah Kabupaten Cianjur. Melalui uji t diperoleh hasil bahwa hipotesis yang menyatakan audit internal. memiliki pengaruh terhadap *Good Government Governance* pada Dinas di Wilayah Kabupaten Cianjur. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa audit internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Good Government Governance* pada Dinas di Kabupaten Cianjur.

Jumlah persentase yang menunjukan keterkaitan antara audit internal terhadap *Good Government Governance* yaitu sebesar 24,7%, sisanya sebesar

75,3% merupakan faktor lainnya yang mempengaruhi. Pada penelitian ini, ukuran yang dijadikan patokan adalah lingkup pemeriksaan pada audit internalnya, jadi faktor lain yang mempengaruhi *Good Government Governance* yaitu lingkup pekerjaan, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, transparansi, performance audit, kualitas program.

Jadi tinggi rendahnya *Good Government Governance* pada penelitian ini salah satunya disebabkan karena audit internal. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan nilai dari korelasi diatas menunjukkan bahwa terbukti teori yang disampaikan oleh Hery, 2010 tentang audit internal mempengaruhi *good government governance* mengatakan bahwa audit internal yang dilakukan secara teratur dapat mencegah terjadinya suatu masalah, manajemen akan dapat dengan segera mengetahui dan mengatasi masalah serts sebab- sebabnya sebelum masalah tersebut menjadi berkelanjutan, atau secara tepat mengidentifikasi masalah yang sebenarnya, sumber – sumber penyebabnya dan mengambil langkah – langkah yang efektif untuk mengatasinya. Efektifnya peran audit internal didalam suatu organisasi diharapkan akan meningkatkan kinerja organisasi yang bersangkutan sehingga tercipta *good governance.* “

2) Pengaruh Pengawasan Internal terhadap *Good Government Governance*

Hubungan antara pengawasan intern dengan *good government governance* berada pada arah positif. Artinya hubungan antara pengawasan intern Dengan *good government governance* termasuk lemah. Ini menggambarkan bahwa ketika pengawasan intern dilakukan, maka akan meningkatkan *good government governance* di dinas wilayah Kabupaten Cianjur.

Melalui data yang terkumpul dilapangan, terbukti bahwa ada pengaruh yang signifikan dari pengawasan intern terhadap *good government governance* pada dinas di wilayah Kabupaten Cianjur. Melalui uji t diperoleh hasil bahwa hipotesis yang menyatakan pengawasan memiliki pengaruh terhadap *good government governance* pada dinas yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa pengawasan intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *good government governance* pada dinas yang ada di Kabupaten Cianjur.

Jumlah persentase hubungan antara pengawasan intern dan *good government governance* dalam penelitian ini adalah sebesar 18,92%, sedangkan sisanya sebesar 81,08% merupakan pengaruh dari faktor lain. Dalam penelitian ini yang dijadikan patokan variabel pengawasan intern adalah komponen pengawasan internnya. Jadi faktor lainnya yang mempengaruhi pengawasan intern dengan *good government governance* bisa disebabkan oleh komponen lingkungan pengendalian, sistem pengawasan yang belum dilaksanakan secara maksimal, pemahaman sistem akuntansi keuangan, serta penatausahaan keuangan daerah.

Jadi tinggi rendahnya *good government governance* pada penelitian ini salah satunya disebabkan karena pengawasan intern. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan teori menurut Tjokromijoyo, 2006, Dunn, 2000 tentang pengawasan intern mempengaruhi *good government governance* mengatakan bahwa Pengawasan menempati posisi penting dalam manajemen pemerintahan, pengawasan merupakan bagian integral dari proses perencanaan yang menyeluruh disamping itu, pengawasan merupakan sumber informasi utama tentang

implementasi kebijakan yang akan menentukan keberhasilan organisasi termasuk organisasi pemerintahan.

3) Pengaruh Audit Internal dan Pengawasan Intern Terhadap *Good Government Governance*

Hubungan kedua variabel bebas (audit internal dan pengawasan intern) secara simultan dengan *good government governance* menunjukkan kriteria cukup kuat. Jadi pada permasalahan yang sedang diteliti diketahui bahwa secara simultan kedua variabel bebas (audit internal dan pengawasan intern) memiliki hubungan yang cukup kuat dengan *good government governance* pada dinas di Kabupaten Cianjur.

Sementara nilai R-Square (0.429), menunjukkan bahwa kedua variabel bebas yang terdiri dari audit internal dan pengawasan intern secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada *good government governance*. Artinya secara bersama-sama variabel bebas (audit internal dan pengawasan intern) memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 42,9% terhadap perubahan *good government governance* pada dinas di Kabupaten Cianjur. Sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati adalah sebesar 57,1%, yaitu merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel bebas yang diteliti.

Hal ini disebabkan oleh laporan tertulis dan laporan hasil rekomendasi yang belum akurat dan belum ditindaklanjuti. Karena menurut IHP semester I tahun 2011 Kabupaten Cianjur memiliki jumlah rekomendasi yang belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 128 atau 37% dan sebanyak 165 rekomendasi atau 28% belum ditindaklanjuti. Tentu saja ini merupakan salah satu unsur yang

memberikan hasil bahwa audit internal tidak berjalan dengan baik. Begitu juga dengan perencanaan pemeriksaan pemeriksaan yang masih tergolong cukup. Banyak faktor yang melatarbelakangi yaitu salah satunya belum siap dan maksimalnya perencanaan pemeriksaan yang akan dilakukan.

Selain itu, masih ada sedikit permasalahan yang ditimbulkan yaitu pada kelemahan struktur pengendalian intern yang bisa terjadi karena entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, entitas tidak memiliki SPI, atau SPI yang sudah ada tidak memadai dan berjalan dengan optimal.

Dengan meningkatnya fenomena audit internal dan pengawasan intern tersebut maka, *good government governance* akan semakin sulit untuk di capai. Namun apabila fenomena pada audit internal dan pengawasan intern dapat diatasi pencapaian *good government governance* akan lebih mudah.